

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kurang optimal, bisa ditarik kesimpulan:

1. Komunikasi

Sudah memenuhi dimensi transisi bahwa suatu kebijakan perlu disalurkan kepada pelaksana kebijakan, lalu disampaikan kepada pihak yang ikut terlibat serta kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kab. Sleman nomor 11 Tahun 2015 tentang RIPK. Menurut Bapak Heri Suprpto selaku Kepala Desa Kepuharjo, beliau mengatakan bahwa dalam proses penyampaian yang berkaitan dengan informasi peraturan tentang kepariwisataan pihak Dinas Pariwisata menyampaikan kepada Pemerintah Desa biasanya melalui pihak Dinas Pariwisata datang ke desa ataupun sebaliknya pihak desa diundang untuk hadir ke Dinas Pariwisata komunikasi berjalan dengan konsisten beliau juga mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kepariwisataan masih mengarah dari Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No 11 Taun 2015 tentang RIPK.

Desa Kepuharjo masi mengarah pengembangan desa wisata yang memaksimalkan potensi-potensi

2. Sumber daya

Disini dibagi menjadi 2 sumber daya manusia, anggaran. Terkait aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pariwisata bawa pemerintah desa masih memiliki beberapa kendala dalam pengembangan desa wisata kendala yang dialami seperti pegawai yang ada di kantor desa ini masih ada yang lulusan SMA serta masih banya para pegawai yang gelar keilmuannya bukan yang dari basic keilmuan pariwisata jadi dalam mengembangkan kami masi sulit dan memerlukan adanya pihak ketiga yang sudah ahli atau profesional dalam hal pengembangan desa wisata. Sedangkan untuk anggaran di desa Kepuharjo masi terbatasnya dana desa dari pemerintah Desa Kepuharjo karena Desa Kepuharjo masih memfokuskan untuk pembuatan sarpras dan infrastruktur.

3. Dispostisi

Dinas Pariwisata waktu itu pernah mengadakan adanya pembinaan untuk desa dalam hal memberdayakan untuk masyarakat yang ada di Desa Kepuharjo.Selain itu ada juga dinas-dinas lain yang membantu untuk bisa mengembangkan desa wisata contohnya saja Dinas Pemberdayaan Perenpuan mereka memberdayakan ibu-ibu rumah tangga agar bisa inovatif kreatif dalam usaha untuk bisa meningkatkan perekonomian di dalam keluarga Dinas tersebut

memberikan pelatihan dalam hal pengembangan produk. Dinas Pariwisata juga terus mengeksplorasi destinasi yang bisa digunakan wisata baru tanpa merubah potensi dari Desa Kepuharjo.

4. Struktur Birokrasi

Pengembangan terkait desa wisata sudah diselenggarakan oleh multilevel birokrasi yang dimana dalam hal ini mencakup dari level atas yakni Pemkab Sleman dalam hal ini didelegasikan kepada Dinas Pariwisata pada level tengah ada dari Pemerintah Kecamatan Cangkringan dan pada level bawah ada kami yakni Pemerintah Desa Kepuharjo. Beliau mengatak terkait mekanisme alur mengenai koordinasi dilakukan secara hierarki yang diawali dari dinas turun ke kecamatan dan sampailah pada level desa bukan hanya Top down saja melainkan koordinasi juga bisa dilakukan dari pokdarwis atau nama lainnya kelompok sadar wisata dimana Pemkab bisa langsung ke pokdarwis tanpa melalui kecamatan maupun tingkat desa. dinas pariwisata memiliki suatu peran dimana dia sebagai koordinator yang utama terkait pembinaan dalam hal kebijakan. untuk level Kecamatan, peran yang dipegang Kecamatan sebagai koor dari forum pokdarwis di tingkat Kecamatan. Level bawah yaitu desa sebagai suatu mitra antara dinas dan pokdarwis yang memiliki fungsi untuk bisa menggerakkan potensi-potensi dari desa wisata. Kepala desa berharap diperlukan upaya penataan struktur birokrasi yang lebih jelas dalam aspek birokrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis simpulkan di atas Saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka peningkatan pelaksanaan kebijakan mengenai pengembangan desa wisata adalah:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia terutama yang sesuai dengan kompetensi keahlian di bidang kepariwisataan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada kelompok sadar wisata di desa.
2. Selain itu, diperlukan upaya penataan struktur birokrasi yang lebih jelas dalam aspek birokrasi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar bisa memberikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) / anggaran kepada instansi yang berkaitan dalam suatu kebijakan pengembangan objek desa wisata ataupun pihak pelaksana kebijakan sesuai dengan anggaran yang diinginkan (diharapkan).